

## Profil Dan Determinan Kerentanan Kemiskinan Rumah Tangga

Achintya Widhi Adnyani, Lilik Sugiharti  
Ilmu Ekonomi, Program Pascasarjana, Universitas Airlangga  
email: [achintyawidhiadnyani@gmail.com](mailto:achintyawidhiadnyani@gmail.com)

### ABSTRAK

*Konsep kerentanan kemiskinan muncul karena adanya guncangan sebagai suatu dimensi penting dari kemiskinan. Keberadaan guncangan menyebabkan ketidakamanan pada kesejahteraan rumah tangga. Pengukuran kerentanan kemiskinan ini mengukur besarnya probabilitas rumah tangga untuk jatuh miskin di masa mendatang. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur tingkat kerentanan kemiskinan dan mengkaji determinannya berdasarkan data survei rumah tangga di Indonesia. Data sampel yang digunakan merupakan data sekunder dari IFLS 5 (Indonesia Family Life Survey) tahun 2014. Pengukuran kerentanan kemiskinan menggunakan Three Stage FGLS (Feasible Generalized Least Square), sedangkan analisis determinannya menggunakan metode regresi logit. Hasil studi ini menunjukkan bahwa Provinsi Lampung, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat memiliki rata-rata nilai kerentanan kemiskinan tinggi. Bahkan, Lampung menjadi provinsi yang paling rentan pada tahun 2014. Selain itu, dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa usia kepala rumah tangga, ukuran rumah tangga, pendidikan kepala rumah tangga, kepemilikan tabungan, kepemilikan tanah, dan lokasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai kerentanan kemiskinan rumah tangga.*

*Kata kunci: Kemiskinan; Kerentanan Kemiskinan; Three Stage FGLS; Logit.*

### ABSTRACT

*Concept of vulnerability to poverty appears by a presence of shocks as an important dimension of poverty. The existence of shocks lead to insecurity in household welfare. This measurement of vulnerability to poverty is trying to measure probability of households fall in to poverty in the future. This study aims to measure household vulnerability to poverty and examine its determinants on the basis of a household survey data for Indonesia. Sampel data used is secondary data from IFLS 5 (Indonesia Family Life Survey) year 2014. The measurement of vulnerability to poverty is analyzed using three stage FGLS (Feasible Generalized Least Square), while its determinant is analyzed using logit regression methods. Results of this study show that Lampung province, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat have a high average value of vulnerability to poverty. Moreover, Lampung Province is the most vulnerable in 2014. Furthermore, this study find that age of household head, education of household head, household size, location, saving ownership, and land ownership have a significant effect on household value of vulnerability to poverty.*

*Keywords: Poverty; Vulnerability to Poverty; Three Stage FGLS; Logit.*

## PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang bersifat global. Secara garis besar, permasalahan dalam kemiskinan berhubungan erat dengan kesejahteraan masyarakat pada suatu negara, baik individu maupun rumah tangga[1]. Kesejahteraan (*well-being*) digambarkan melalui kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan akses terhadap sumber daya [2]. Selain itu, kesejahteraan juga dilihat dari kemampuan kunci (*key capabilities*) individu untuk dapat berfungsi dalam masyarakat. Ketiadaan kemampuan kunci tersebut menjadi salah satu penyebab individu atau rumah tangga jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Kompleksitas permasalahan kemiskinan yang bersifat multidimensi tersebut membentuk komitmen pemimpin dunia, termasuk Indonesia, untuk bekerjasama mengentaskan kemiskinan. Program pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*) di tingkat global merujuk pada kesepakatan *Millenium Development Goals* pada tahun 2000. Berdasarkan kesepakatan tersebut, pada tahun 2015 *World Bank* dan *United Nations (UN)* menargetkan pengurangan setengah dari populasi penduduk dunia yang berada dalam kemiskinan [3]. Lebih lanjut, pemerintah Indonesia juga bersepakat menargetkan pengurangan kemiskinan pada tahun 2015 sebesar 7,5 persen dari 27,2 juta penduduk miskin Indonesia yang terdaftar pada tahun 1990[4]. Komitmen pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kemiskinan juga tercermin dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005-2009 yang merupakan bagian dari Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK)[5]. Target yang ditetapkan pemerintah yaitu mengurangi angka kemiskinan sebesar 10 persen pada tahun 2009 dari 18,2 persen angka kemiskinan pada tahun 2002.

Program pengentasan kemiskinan tersebut telah memberikan hasil yang cukup baik bagi Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan adanya tren penurunan. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2005 mengalami penurunan dari 38.39 juta jiwa menjadi 35,1 juta jiwa pada tahun 2002. Persentase penduduk miskin juga mengalami penurunan dari 18,2 persen pada tahun 2002 menjadi 15,97 persen pada tahun 2005. Selanjutnya, penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia terus terjadi selama periode tahun 2007 hingga tahun 2014. Gambar 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin mencapai angka 37,17 juta jiwa atau sebanyak 16,58 persen. Sementara itu, pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin mencapai angka 28.28 juta jiwa atau 11,25 persen. Secara keseluruhan, selama periode tahun 2006 hingga 2010, penurunan angka kemiskinan mampu mencapai 8,88 juta jiwa, sedangkan pada periode tahun 2010 hingga 2014 angka kemiskinan hanya mampu diturunkan sebesar 2,74 juta jiwa [6].

Namun, perlu diingat bahwa program pengentasan kemiskinan dihadapkan pada kendala yang besar, seperti adanya resiko-resiko sosial, ekonomi dan politik, ketidakpastian, serta kemampuan yang terbatas untuk memulihkan diri (*recovery*)[7]. Dampak dari kendala tersebut dapat dilihat dari peningkatan angka kemiskinan yang terjadi pada tahun 2006. Jumlah penduduk miskin meningkat dari 35.1 juta jiwa atau 15.97 persen pada tahun 2005 menjadi 39.3 juta jiwa atau secara relatif 17.75 persen pada tahun 2006. Kenaikan angka kemiskinan tersebut disebabkan adanya guncangan ekonomi berupa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebanyak dua kali pada bulan Maret dan Oktober 2005. Pada bulan Maret harga bensin premium meningkat sebesar 33 persen, minyak solar meningkat sebesar 27 persen, dan minyak tanah meningkat sebesar 22 persen. Sementara itu, pada bulan Oktober harga bensin premium dan minyak solar masing-masing mengalami peningkatan sebesar 88 persen dan 105 persen, sedangkan minyak tanah turun sebesar 9 persen. Selanjutnya, pasca kenaikan BBM harga bahan pokok khususnya beras melambung tinggi yakni mencapai 33 persen[5]. Jika harga beras naik, kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan kalori akan menurun. Guncangan akibat kenaikan harga BBM subsidi tersebut kembali terjadi pada November tahun 2014. Harga bensin premium ditetapkan dari Rp. 6.500/liter menjadi Rp. 8.500/liter, minyak solar ditetapkan dari Rp. 5.500/liter menjadi Rp. 7.500/liter, sedangkan harga minyak tanah tidak mengalami perubahan[8].

Adanya kebijakan kenaikan harga BBM dapat memberikan dampak langsung dan tidak langsung bagi kenaikan harga bahan makanan [9]. Hal ini tidak terlepas dari kenaikan biaya produksi atau biaya angkut untuk pendistribusian barang dan jasa. Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya kenaikan harga barang dan jasa yang tidak terkontrol dapat menyebabkan inflasi yang pada akhirnya berimbas pada perlambatan penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kerentanan kemiskinan. Guncangan (*shocks*) memang merupakan salah satu penyebab paling krusial dalam kemiskinan. Jenis guncangan yang dimaksud berkaitan dengan kondisi ekonomi, seperti guncangan finansial (*financial shocks*) pada pendapatan, pengeluaran, harta dan aset keuangan, serta resiko-resiko non-finansial lainnya[10]. Umumnya, rumah tangga dengan jumlah anggota keluarga yang banyak cenderung lebih rentan terhadap guncangan dibandingkan rumah tangga dengan anggota keluarga yang sedikit. Di sisi lain, individu yang tidak memiliki aset keuangan dan berpenghasilan rendah tidak mampu mengatasi guncangan. Dengan demikian, adanya guncangan dapat memperbesar kemungkinan bagi masyarakat untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan atau mengalami kerentanan kemiskinan (*vulnerability to poverty*) [11]. Suatu individu atau rumah tangga dikatakan rentan miskin apabila berada tepat di atas garis kemiskinan. World Bank melaporkan bahwa hampir 42 persen dari seluruh penduduk

Indonesia berada di antara garis kemiskinan, yaitu USD\$1 dan USD\$2 per hari berdasarkan standart *Purchasing Power Parity* (PPP).

Kelompok penduduk inilah yang dikatakan sebagai penduduk rentan miskin, jika dilakukan penetapan standar PPP sebesar USD\$1, terdapat 7,4% penduduk yang tergolong miskin. Saat terjadi kenaikan standar PPP menjadi USD\$2 per hari, maka jumlah penduduk yang tergolong miskin menjadi 49 %. Hal serupa juga dialami penduduk Indonesia saat dihadapkan pada kondisi garis kemiskinan [12]. Ketika garis kemiskinan dinaikkan menjadi USD\$1,55 per hari, maka terdapat 16,7% penduduk Indonesia yang tergolong miskin. Konsep kerentanan kemiskinan dijelaskan sebagai risiko sebuah rumah tangga untuk jatuh miskin dalam waktu mendatang [13]. Bahkan dalam penelitiannya dikatakan bahwa jumlah penduduk yang tergolong rentan miskin di Indonesia masih banyak. Laporan TNP2K pada gambar 1.2 menunjukkan kondisi kerentanan kemiskinan penduduk di Indonesia. Distribusi pengeluaran per kapita per bulan penduduk terkonsentrasi di sebelah kiri garis kemiskinan. Hal ini menandakan bahwa masih terdapat kelompok penduduk yang tergolong miskin atau memiliki pengeluaran per kapita sebulan dibawah Rp. 200.000,- yaitu sebanyak 11,25 persen. Sementara itu, terdapat sejumlah penduduk yang berada tepat atau sedikit di atas garis kemiskinan. Penduduk tersebut hidup diantara 1 dan 2 dolar AS per hari atau 1,4 kali sedikit di atas garis kemiskinan nasional[5]. Penduduk-penduduk inilah yang kemudian dikatakan rentan miskin. Berdasarkan data TNP2K tersebut, dapat disimpulkan bahwa jumlah kelompok yang rentan miskin mencakup paling tidak 40 persen dari total populasi di Indonesia[14]. Penetapan pengukuran kerentanan kemiskinan (*vulnerability to poverty*) dilakukan terkait adanya keterbatasan pengukuran kemiskinan, yaitu *headcount poverty rate*[15]. Metode ini hanya menyajikan informasi mengenai rumah tangga yang berada di bawah dan di atas garis kemiskinan. Hal ini dapat diartikan bahwa metode *headcount poverty rate* mengabaikan rumah tangga yang berada tepat di garis kemiskinan atau rentan menjadi miskin.

Selain itu, konsep pengukuran ini bersifat statis dan *expost* , sehingga baru dapat dilakukan setelah individu atau rumah tangga tersebut jatuh miskin[10]. Padahal, fenomena kemiskinan yang terjadi saat ini bersifat stokastik sehingga memiliki konsep yang berseberangan dengan *headcount poverty rate* [13]. Analisis kerentanan kemiskinan bersifat *ex ante* atau dampak di masa mendatang. Metode ini dapat digunakan untuk menganalisis profil kerentanan kemiskinan rumah tangga. Hal ini penting dilakukan terkait kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mencegah penduduk yang rentan miskin (*vulnerable people*) jatuh lebih dalam ke dalam kemiskinan[5]. Namun, perlu diingat bahwa kebijakan pencegahan kerentanan kemiskinan tidak terlepas dari determinannya. Determinan tersebut

berupa karakteristik sosial, ekonomi, dan demografi rumah tangga. Secara garis besar, karakteristik rumah tangga yang dimaksud meliputi faktor usia kepala rumah tangga yang tinggi[16], memiliki jumlah anggota rumah tangga yang besar, tingkat pendidikan yang rendah, individu atau rumah tangga yang berada di pedesaan, rumah tangga yang tidak memiliki tabungan, dan rumah tangga yang tidak memiliki tanah[17]. Faktor usia kepala rumah tangga yang tinggi menjadi penyebab kerentanan kemiskinan karena penduduk berusia tua cenderung tidak produktif. Dana pensiun atau jaminan hari tua yang diterima dari pemerintah tidak mampu membantu mereka keluar dari kerentanan kemiskinan . Umumnya, penduduk berusia tua yang tergolong tidak rentan miskin dikarenakan memiliki anak-anak dengan pekerjaan yang baik, penurunan rasio ketergantungan dalam keluarga, dan aset keuangan yang semakin meningkat seiring dengan pertambahan usia. Faktor demografi lain yang juga menjadi faktor kerentanan kemiskinan adalah jumlah anggota rumah tangga yang banyak [13]. Besarnya jumlah anggota rumah tangga berdampak pada rasio ketergantungan yang tinggi[18]. Akibatnya, pendapatan yang diperoleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga yang banyak dalam rumah tangga, seperti kebutuhan akan makanan[5]. Faktor lokasi rumah tangga yang berada di wilayah pedesaan memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami kerentanan kemiskinan ([13]. Salah satu penyebab penduduk di pedesaan tergolong rentan miskin adalah infrastruktur dan transportasi yang kurang berkembang[19]. Hal ini menjadi faktor penghambat bagi penduduk dalam mengakses pasar, fasilitas layanan kesehatan, dan pendidikan. Faktor tingkat pendidikan yang rendah juga menjadi penyebab rumah tangga mengalami kerentanan kemiskinan [11]. Tingkat pendidikan mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Hal ini disebabkan *skill* dan pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan dapat meningkatkan kualitas modal manusia pada masing-masing individu. Keterbatasan pengetahuan menyebabkan mereka tidak mampu mengakses berbagai macam sumber daya sehingga rentan untuk jatuh miskin[20].

Faktor ekonomi berupa keterbatasan terhadap kepemilikan aset keuangan, seperti tabungan juga menjadi faktor kunci meningkatnya resiko kerentanan kemiskinan[21]. Terutama bagi rumah tangga yang berpenghasilan rendah dan tidak memiliki tabungan. Sebab, mereka akan kesulitan mendapatkan dana untuk pendidikan atau merintis usaha di tahun mendatang[22]. Selain itu, mereka juga tidak mampu menghadapi guncangan ekonomi seperti bencana alam dan kenaikan harga[5]. Faktor penting lain dari kerentanan kemiskinan adalah aset fisik berupa kepemilikan tanah oleh rumah tangga. Umumnya, mereka yang memiliki harta atau aset fisik cenderung tidak rentan miskin[23]. Rumah tangga yang memiliki aset fisik diyakini memiliki konsumsi yang lebih besar di tahun

mendatang. Kepemilikan tanah juga dapat menjadi sumber pendapatan lain untuk menghadapi guncangan negatif pada pendapatan utama. Penelitian mengenai kerentanan kemiskinan dengan menggunakan data SUSENAS tahun 1996 dan 1999 [13]. Namun, penelitian tersebut hanya mengkaji profil kerentanan kemiskinan rumah tangga. Oleh karena itu, dalam analisis lanjutan ini penulis mencoba untuk menganalisis profil kerentanan kemiskinan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Studi ini mengacu pada penelitian dengan pengembangan pada analisisnya[16].

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penggunaan pendekatan kuantitatif terbagi menjadi dua bagian, yakni: 1. Cumulative Distribution Function (CDF) sebagai penghitungan statistik untuk menghitung nilai kerentanan kemiskinan. Sebelum melakukan penghitungan statistik pada model 2.1, perlu dilakukan regresi dengan metode ekonometrik Three-Step Feasible Generalized Least Square (FGLS). Metode ekonometri dilakukan untuk memperoleh nilai ekspektasi log konsumsi ( $X_h^\theta$ ) dan akar estimasi varian log konsumsi ( $\sqrt{X_h\theta}$ ). Hasil penghitungan dengan kedua metode tersebut akan menghasilkan angka kerentanan kemiskinan dan kondisi kerentanan kemiskinan rumah tangga pada 14 provinsi di Indonesia. 2. Regresi logistik digunakan sebagai pendekatan ekonometri untuk mencari determinan status kerentanan kemiskinan rumah tangga. Penggunaan regresi logistik disebabkan variabel dependen dalam model bersifat diskrit, dimana variabel dependen bernilai 1 jika rentan tinggi dan bernilai 0 jika rentan rendah. Selain itu, error dari model regresi yang digunakan tidak berdistribusi normal. Pada akhirnya, analisis kerentanan kemiskinan bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan bagi upaya mengurangi kerentanan kemiskinan rumah tangga yang tergolong rentan tinggi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kemiskinan masih menjadi masalah besar yang harus dihadapi bangsa Indonesia. Namun, beberapa tahun terakhir masalah kemiskinan berkembang menjadi masalah kerentanan kemiskinan. Secara ekonomi, individu atau rumah tangga dikatakan rentan apabila hidup di atas garis kemiskinan, namun mudah jatuh miskin di tahun mendatang karena tidak mampu bertahan saat terjadi guncangan ekonomi. Secara sosial, penduduk rentan adalah individu atau rumah tangga yang tersingkir dari kehidupan sosial dan kehilangan hak-hak dasarnya karena adanya resiko sosial berupa kehilangan pekerjaan, penyakit, kecacatan fisik, dan kondisi tidak menguntungkan lainnya. Berbagai jenis resiko dan guncangan yang menimpa rumah tangga rentan miskin tersebut secara umum meliputi resiko pada aset, pendapatan, dan kesejahteraan[5].

Tabel 1. Rerata Nilai Kerentanan Kemiskinan Rumah Tangga Provinsi Tahun 2014

Provinsi	Rentan tinggi		Provinsi	Rentan rendah	
	rata-rata	proporsi		rata-rata	proporsi
Lampung	0,658	72,26%	Banten	0,491	51,14%
Sumatera Barat	0,639	66,74%	Sumatera Selatan	0,492	55,02%
DKI Jakarta	0,626	66,15%	Jawa Tengah	0,481	46,83%
Kalimantan Selatan	0,574	59,91%	Jawa Timur	0,479	48,38%
Sumatera Utara	0,568	57,63%	Bali	0,477	48,55%
NTB	0,514	51,25%	DIY	0,445	39,96%
			Jawa Barat	0,409	36,98%
			Sulawesi Selatan	0,383	33,56%
RATA-RATA 14 PROVINSI					
0.517					

Sumber: *Indonesia Family Life Survey (2014)*

Pembahasan pertama dalam studi ini mengarah pada profil kerentanan kemiskinan rumah tangga per provinsi tahun 2014. Kondisi kerentanan kemiskinan pada 14 provinsi menunjukkan bahwa Lampung, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Barat termasuk dalam kelompok kerentanan tinggi. Bahkan, rata-rata nilai kerentanan kemiskinan pada keenam provinsi melebihi keseluruhan rata-rata nilai kerentanan kemiskinan dari 14 provinsi terpilih tersebut. Ini terjadi terkait dampak yang ditimbulkan dari berbagai jenis resiko dan guncangan yang telah dijelaskan sebelumnya. Secara garis besar, tingginya rata-rata nilai kerentanan kemiskinan tersebut disebabkan oleh rendahnya Indeks Pembangunan Manusia, adanya bencana alam, dan lonjakan harga di pasar makanan.

Kondisi kerentanan kemiskinan menunjukkan bahwa provinsi Lampung dan Nusa Tenggara Barat memiliki nilai kerentanan kemiskinan yang tinggi. Bahkan, pada tahun 2014 rata-rata nilai kerentanan kemiskinan rumah tangga di provinsi Lampung menduduki peringkat pertama, sedangkan Nusa Tenggara Barat berada di posisi ke lima. Hal ini dikarenakan kedua provinsi tersebut memiliki Indeks Pembangunan Manusia yang lebih rendah jika dibandingkan 12 provinsi lainnya.

Tabel 2. Indeks Pembangunan Manusia per Provinsi Tahun 2010, 2012, dan 2014

Provinsi	2010	2012	2014
Lampung	63,71	64,87	66.42
Sumatera Barat	67,25	68,36	69.36
DKI Jakarta	76,31	77,53	78.39
Kalimantan Selatan	65,20	66,68	67.63
Sumatera Utara	67,09	67,74	68.87
Nusa Tenggara Barat	61,16	62.98	64.31

Jawa Timur	65,36	66,74	68.14
Jawa Tengah	66,08	67,21	68.78
D.I Yogyakarta	75,37	76,15	76.81
Bali	70,10	71,62	72.48
Banten	67,54	68,92	69.89
Jawa Barat	66,15	67,32	68.80
Sulawesi Selatan	66,00	67,26	68.49
Sumatera Selatan	64,44	65,79	66.75
Indonesia	66,53	67,70	68,90

Sumber: Badan Pusat Statistik (2014)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2014), nilai Indeks Pembangunan Manusia tahun 2014 di provinsi Lampung adalah sebesar 66,42, sedangkan di provinsi Nusa Tenggara Barat hanya sebesar 64,31. IPM yang rendah tersebut tidak hanya terjadi pada tahun 2014 saja. Pada tahun 2010 dan 2012, nilai IPM di dua provinsi tersebut juga terbilang rendah. Nilai IPM tahun 2010 di provinsi Lampung adalah sebesar 63,71, sedangkan di Nusa Tenggara Barat adalah sebesar 61,16. Selanjutnya, pada tahun 2012, provinsi Lampung masih memiliki nilai IPM yang rendah, yaitu 64,87, sedangkan Nusa Tenggara Barat memiliki nilai 62,98. Secara garis besar, angka IPM di kedua provinsi tersebut masih berada di bawah nilai IPM Nasional selama periode tahun 2010, 2012, dan 2014.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator pencapaian pembangunan kualitas hidup manusia. Menurut Badan Pusat Statistik, IPM dibentuk melalui tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and happy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*) [24]. Komponen yang digunakan dalam IPM meliputi Angka Harapan Hidup (AHH) untuk mewakili bidang kesehatan, Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) untuk mengukur pembangunan di bidang pendidikan, serta pengeluaran per kapita yang digunakan untuk melihat kemampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok. Berdasarkan pemahaman mengenai IPM tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila suatu wilayah memiliki nilai IPM yang tinggi, maka kualitas manusia pada wilayah tersebut juga tinggi. Bagi provinsi dengan nilai IPM yang rendah seperti Lampung dan Nusa Tenggara Barat, tentu saja kondisi ini mempengaruhi tingginya rata-rata nilai kerentanan kemiskinan di masing-masing wilayah. Sebab, kualitas modal manusia di wilayah tersebut masih rendah. Padahal, kualitas modal manusia merupakan salah satu cara utama untuk memperbesar aset, mengurangi ketimpangan pendapatan, dan mengurangi kerentanan kemiskinan. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) menyebabkan



rumah tangga tidak mampu menghadapi resiko guncangan. Ini terjadi karena tingkat pendidikan dan kesehatan yang rendah menurunkan produktivitas dan kapabilitas individu. Pada umumnya, individu dengan kualitas SDM yang rendah rawan kehilangan pekerjaan atau *unemployment* karena tenaga kerja yang banyak diserap adalah mereka yang berpendidikan tinggi. Akibatnya pendapatan yang diperoleh oleh rumah tangga atau individu di wilayah dengan IPM rendah tidak setinggi pendapatan rumah tangga di wilayah yang memiliki IPM tinggi. Temuan ini berimplikasi pada kebijakan pengentasan kemiskinan dan kerentanan di tingkat Nasional. Penanganan kerentanan kemiskinan memerlukan kebijakan yang bersifat struktural. Salah satu bentuk kebijakan struktural tersebut adalah investasi modal manusia (*human capital investment*). Kebijakan peningkatan kualitas SDM di bidang kesehatan dan pendidikan terus menjadi prioritas dalam RPJMN 2010-2014 hingga RPJMN 2015-2019. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan telah menyusun program-program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan melalui Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan di bidang kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program BSM memberikan bantuan uang tunai untuk anak-anak miskin dan rentan miskin dari tingkat SD/MI hingga SMA/SMK/MA. Total jumlah siswa yang mendapatkan BSM mencapai 15,43 juta siswa. Namun, dalam realisasinya program ini hanya mampu menjangkau empat persen dari total rumah tangga miskin dan rentan miskin di tingkat SD hingga SMP dan dua persen di tingkat SMA. Sementara itu, keberadaan program JKN ditujukan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat miskin dan rentan, sehingga produktivitas ekonomi rumah tangga meningkat. Berdasarkan laporan Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2010-2014, kendala pelaksanaan program JKN adalah masih banyak masyarakat miskin dan rentan yang belum memiliki kartu jamkesmas, sehingga ketika sakit sulit mengakses fasilitas kesehatan. Selain itu, 80 persen pemegang kartu jamkesmas belum mengetahui berbagai manfaat yang dapat diterima dari fasilitas jamkesmas. Selanjutnya, berdasarkan penghitungan nilai kerentanan kemiskinan menunjukkan bahwa provinsi DKI Jakarta dan Sumatera Utara juga memiliki rata-rata nilai kerentanan kemiskinan tinggi. Hal ini disinyalir dapat terjadi karena adanya resiko bencana alam berupa banjir di DKI Jakarta dan erupsi Gunung Sinabung di Sumatera Utara pada tahun 2014. Bencana alam merupakan bagian dari guncangan yang menimbulkan kerugian pada perekonomian. Bahkan, menurut Bank Indonesia, peristiwa bencana alam dapat mendorong bertambahnya jumlah penduduk yang berstatus rentan miskin[9]. Hubungan antara resiko bencana alam dengan kerentanan kemiskinan terbagi menjadi tiga [13]. Pertama, kerugian finansial karena kerusakan dan hilangnya aset-aset yang dimiliki rumah tangga, seperti tempat tinggal, tanah pertanian, dan infrastruktur.

Kedua, terhentinya proses produksi dan berkurangnya output akibat terhambatnya distribusi. Ketiga, meningkatnya angka kemiskinan di suatu negara atau wilayah yang terkena bencana alam. Bencana alam juga memberikan dampak jangka panjang dan jangka pendek[25]. Dampak jangka pendek berkaitan dengan timbulnya keresahan dan ketidakpastian pada masyarakat. Sementara itu, dampak jangka panjang dapat menyebabkan terhambatnya penanganan pemerintah untuk mengurangi masyarakat miskin dan rentan miskin (*vulnerable people*). Bencana alam berupa erupsi gunung sinabung dan banjir pada pertengahan tahun 2013 hingga awal tahun 2014 juga disinyalir menjadi penyebab tingginya rata-rata kerentanan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2014. Bank Indonesia menjelaskan bahwa erupsi Gunung Sinabung di Sumatera Utara menyebabkan terganggunya distribusi dan produksi bahan pangan khususnya kelompok *volatile food*[9]. Hal ini terjadinya karena akses jalan terbatas untuk mendistribusikan barang. Debu vulkanik merusak tanaman pangan dan hortikultura di kecamatan karo dengan total kerugian pertanian mencapai 97,7 miliar rupiah.

Produksi pertanian berkurang sebesar 30 persen atau sekitar 2.959 luas areal pertanian yang terdiri dari 35 ha tanaman pangan dan 2.924 ha tanaman hortikultura. (Indonesia Family Life Survey, 2014). Padahal, penduduk pedesaan menggantungkan sebagian besar penghasilan utamanya dari sektor pertanian. Adanya bencana alam yang berdampak pada kerusakan hasil pertanian tersebut menyebabkan penduduk pedesaan kehilangan pendapatan, sehingga pengeluaran untuk konsumsi menurun. Akibatnya, terjadi penurunan kesejahteraan yang tercermin dari peningkatan persentase penduduk miskin. Penduduk miskin dan rentan miskin di desa bertambah menjadi 38.600 orang, sedangkan di perkotaan menjadi 35.300 orang. Adapun jumlah korban yang mengungsi mencapai 10.377 jiwa atau 2.762 kepala keluarga. Sementara itu, permasalahan bencana alam di provinsi DKI Jakarta dari tahun ke tahun memang belum berubah, yaitu masih berupa banjir dan kebakaran. Bank Dunia melaporkan bahwa banjir pada tahun 2014 menimbulkan kerugian bagi 132.000 orang[9]. Jumlah korban mengungsi diperkirakan sebanyak 6.289 jiwa, sedangkan korban meninggal sebanyak 5 orang. Total kerugian ekonomi dan keuangan akibat banjir diperkirakan mencapai lima triliun rupiah. Selain itu, jika diukur menurut dampak sektoralnya, tertutupnya beberapa akses jalan dapat menghambat proses produksi dan distribusi barang-barang produksi dari dan ke dalam kota Jakarta. Hal ini berdampak pada kenaikan harga kelompok bahan makanan sebesar 7,96 persen dan kelompok makanan jadi sebesar 4,92 persen, sehingga menyebabkan tingginya angka inflasi. Lonjakan harga di pasar makanan merupakan salah satu bentuk resiko atau guncangan pada komponen kesejahteraan (*well-being*) rumah tangga. Kenaikan harga yang tajam menyebabkan daya beli

masyarakat rendah, konsumsi per kapita rumah tangga menurun, dan terjadi peningkatan kerentanan kemiskinan. Lebih lanjut, berdasarkan *Laporan Keuangan Nusantara 2014*, inflasi karena banjir di DKI Jakarta menunjukkan *tren* meningkat dari tahun 2012 hingga 2014. Bahkan, sampai dengan Agustus 2014 angka inflasi Jakarta sebesar 3,96 persen berada di atas inflasi Nasional sebesar 3,42 persen.

Terkait dengan temuan ini, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi DKI Jakarta merumuskan kebijakan untuk menekan angka inflasi akibat banjir. Target sasaran inflasi yang ditetapkan adalah sebesar 4,5 persen + 1 persen. Namun, beberapa hal masih perlu dilakukan untuk mencapai sasaran inflasi, yaitu (1), mengintensifkan koordinasi untuk menjamin ketersediaan pasokan, produksi dan distribusi kebutuhan bahan pangan pokok; (2) mendorong percepatan pembangunan infrastruktur daerah melalui penerapan APBD untuk menjamin kelancaran produksi dan distribusi pangan; dan (3) mengelola ekspektasi masyarakat mengenai kesiapan pemerintah untuk memenuhi pasokan kebutuhan pangan dan energi wilayah. Di sisi lain, peran masyarakat dan pemerintah juga diperlukan dalam mitigasi banjir di provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membersihkan kanal, sungai, dan tanggul dari sampah, sehingga daerah resapan air dapat berfungsi dengan baik. Selain itu, pemerintah juga mulai melakukan investasi dan pengembangan untuk teknologi pencegah banjir, serta rencana pengambilalihan tanah dan pemukiman kembali (*land acquisition and resettlement*) dengan berkonsultasi pada masyarakat yang terdampak banjir[9]. Provinsi dengan nilai kerentanan kemiskinan tinggi selanjutnya adalah Sumatera Barat dan Kalimantan Selatan. Pemicu tingginya nilai kerentanan kemiskinan di kedua provinsi tersebut disinyalir karena kenaikan harga yang tinggi pada *administered price* dan *volatile food*. Penyumbang kenaikan harga dari kelompok *administered price*, yaitu tarif angkutan umum akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak. Kenaikan harga BBM mengharuskan terjadi penyesuaian harga-harga pada kelompok *volatile food*, yaitu beras[9]. Beras merupakan bagian dari kebutuhan dasar dan komponen penting bagi masyarakat miskin dan rentan. Adanya kenaikan harga beras menjadi guncangan tersendiri bagi kesejahteraan rumah tangga khususnya mereka yang konsumsi per kapitanya berada di bawah atau tepat di atas garis kemiskinan. Masyarakat miskin dan rentan miskin mengalami pelemahan daya beli terhadap kebutuhan dasar, sehingga beresiko untuk jatuh miskin di tahun mendatang. Oleh karena itu, kenaikan harga dan inflasi perlu mendapat perhatian pemerintah karena dapat berimbas pada kenaikan angka kemiskinan dan kerentanan. Peningkatan laju inflasi di Kalimantan Selatan adalah sebesar 11 persen, dimana angka inflasi di tahun 2014 ini lebih besar dibandingkan tahun 2013 sebesar 6,40 persen. Mengacu pada Laporan Perekonomian Kalimantan Selatan Tahun 2014,

kelompok yang mengalami inflasi terbesar adalah kelompok bahan makanan yang mencapai 10,13 persen, kelompok kesehatan sebesar 9,36 persen, dan makanan jadi sebesar 8,65 persen. Sementara itu, laju inflasi Sumatera Barat juga meningkat sebagai imbas dari penyesuaian harga BBM bersubsidi dan keterbatasan pasokan beras. Bank Indonesia (2014) melaporkan bahwa inflasi Sumatera Barat tahun 2014 tercatat sebesar 11,58 persen meningkat dari 6 persen pada tahun 2013. Kondisi ini pula yang mengakibatkan inflasi Sumatera Barat berada di atas inflasi nasional yang hanya sebesar 8,36 persen. Jika dikelompokkan berdasarkan kelompok barang dan jasa, penyumbang inflasi terbesar berasal dari kelompok bahan makanan, yaitu beras dan cabai. Terkait dengan inflasi akibat kenaikan harga bahan makanan, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) telah melakukan berbagai kebijakan strategis, satu diantaranya adalah Operasi Pasar Khusus (OPK) untuk beras. Langkah ini dilakukan guna menstabilkan harga beras yang ada di pasaran. Pemerintah juga telah membuat program Raskin yang ditujukan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pokok. Jumlah Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat(RTS-PM) pada tahun 2013 dan 2014 mencapai 15.530.897 rumah tangga. Pada tahun 2014, RTS-PM Program Raskin mencakup sekitar 25 persen rumah tangga miskin dan rentan miskin[15].Namun, dalam pelaksanaannya, ada beberapa kendala yang harus dihadapi pemerintah. Hal ini berkaitan dengan ketidaktepatan sasaran penerima program Raskin. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan tinggi juga menerima beras Raskin. Mengacu pada Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2010-2014, kondisi sarana dan prasarana moda serta angkutan jalan yang buruk menyebabkan proses distribusi beras Raskin belum berjalan dengan baik. Setelah melakukan pembahasan mengenai provinsi-provinsi yang mengalami kerentanan kemiskinan tinggi, selanjutnya akan dibahas terkait variabel-variabel yang berpengaruh terhadap status kerentanan kemiskinan rumah tangga. Berdasarkan hasil regresi pada bagian sebelumnya, diketahui bahwa determinan dari status kerentanan kemiskinan adalah usia kepala rumah tangga, usia kuadrat kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, tingkat pendidikan kepala rumah tangga, kepemilikan tabungan, kepemilikan tanah, dan lokasi tempat tinggal. Akan tetapi, terdapat perbedaan besaran koefisien *odds ratio* pada masing-masing variabel independen tersebut. Hal ini dapat diartikan bahwa meskipun kedelapan variabel independen tersebut sama-sama berpengaruh, namun pengaruhnya berbeda-beda untuk status kerentanan kemiskinan.

Variabel usia kepala rumah tangga memiliki hubungan negatif dengan status kerentanan kemiskinan. Artinya, seiring dengan pertambahan usia kepala rumah tangga maka kemungkinan rumah tangga untuk berstatus rentan miskin semakin kecil.

Bertambahnya satu satuan pada usia kepala rumah tangga akan menurunkan resiko rumah tangga untuk berstatus rentan miskin sebesar 0,70082 kali. Hal ini bertentangan dengan yang menemukan bahwa usia kepala rumah tangga memiliki hubungan positif terhadap status kerentanan kemiskinan, namun sesuai dengan temuan [16] dan [26]. Salah satu penyebab terjadinya hal tersebut karena usia dipandang sebagai tingkat kematangan dalam *skill* dan pengalaman kerja [16]. Oleh karena itu, semakin meningkatnya usia kepala rumah tangga maka *skill* dan pengalamannya dalam bekerja juga semakin tinggi, sehingga umumnya memiliki pendapatan yang tinggi. Selain itu, produktivitas kepala rumah tangga juga meningkat seiring dengan penambahan usia, sehingga kesempatan untuk mencari penghidupan yang layak dari pendapatan juga semakin besar [27]. Akan tetapi, pola penurunan resiko rumah tangga untuk berstatus rentan miskin tersebut hanya terjadi sampai titik usia tertentu saja, yaitu 40 tahun. Hal tersebut dikarenakan variabel kuadrat usia kepala rumah tangga berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap status kerentanan kemiskinan. Artinya, setelah melewati usia 40 tahun, maka penambahan usia kepala rumah tangga akan menyebabkan kemungkinan untuk rentan miskin meningkat. Hasil penghitungan titik minimum usia kepala rumah tangga terhadap kerentanan kemiskinan.

Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), 70 persen penduduk yang berusia di atas 40 tahun bekerja di sektor informal yang identik dengan minimnya perlindungan sosial [24]. Selain itu, pekerja di sektor informal memiliki penghasilan reguler yang rendah dan fluktuatif, sehingga tidak mampu membayar asuransi kesehatan. Apabila pekerja di sektor informal ini sakit, maka mereka akan kehilangan penghasilan untuk biaya berobat. Titik minimum usia kepala rumah tangga yang berada pada usia 40 tahun tersebut juga dipengaruhi oleh kondisi data sampel. Dalam studi ini, rata-rata usia kepala rumah tangga yang berstatus rentan tinggi berada pada usia di atas 40 tahun, yaitu sebesar 80,76 persen.

Sementara itu, proporsi kepala rumah tangga berusia 18-39 tahun yang berstatus rentan tinggi sebesar 19,24 persen. Lebih lanjut, penambahan usia mengarahkan kepala rumah tangga memasuki kelompok usia tidak produktif, yaitu di atas 64 tahun. Pada usia tidak produktif, kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang besar dan mempertahankan kesejahteraan semakin menurun. Usia tua juga rawan terhadap penyakit dan penurunan kemampuan fisik untuk bekerja, sehingga produktivitas ekonominya berkurang dan pendapatannya menurun saat melewati *middle age*. Hal tersebut yang menyebabkan mereka memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk jatuh miskin di tahun mendatang. Hasil selanjutnya terkait dengan jumlah anggota rumah tangga. Variabel ini

berhubungan positif dengan status kerentanan kemiskinan rumah tangga. Artinya, peningkatan jumlah anggota rumah tangga akan meningkatkan kemungkinan rumah tangga untuk berstatus rentan miskin sebesar 3,27785 kali. Hal tersebut mengindikasikan bahwa jumlah rumah tangga yang semakin besar akan menyebabkan kemungkinan resiko rumah tangga untuk jatuh miskin di tahun mendatang semakin besar pula. Sebab, tingkat pendapatan tertentu yang diperoleh harus digunakan untuk mencukupi kebutuhan dasar lebih banyak anggota. Disamping itu, kebutuhan terhadap biaya investasi untuk meningkatkan kualitas modal manusia dalam rumah tangga, seperti gizi dan pendidikan membutuhkan biaya lebih besar. Dengan demikian, jumlah rumah tangga yang besar identik dengan kemungkinan lebih besar untuk berstatus rentan miskin dibandingkan jumlah rumah tangga yang sedikit.

Hasil temuan ini sesuai dengan penelitian kerentanan kemiskinan berhubungan erat dengan jumlah anggota rumah tangga [18]. Jumlah rumah tangga yang besar menyebabkan semakin besar pula rasio ketergantungan dalam rumah tangga [2]. Nigeria menambahkan bahwa dengan besarnya ukuran rumah tangga maka pengeluaran per kapita rumah tangga akan berkurang [27]. Akibatnya, semakin sedikit tingkat kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh anggota rumah tangga, sehingga rentan untuk jatuh miskin. Analisis berikutnya mengarah pada variabel *dummy* tingkat pendidikan kepala rumah tangga.

Tabel 3. Hasil Estimasi Model Logit Status Kerentanan Kemiskinan

<b>vul</b>	<b>Coef.</b>	<b>Std.</b>	<b>Err. z</b>	<b>P&gt; z </b>	<b>odds ratio</b>
<b>age</b>	-0,35549	0,02275	-15,62	0,000	0,70082
<b>agesqr</b>	0,00442	0,00023	19,08	0,000	1,00444
<b>hhsz</b>	1,18718	0,03422	34,69	0,000	3,27785
<b>Deduc</b>	-4,39088	0,11411	-38,48	0,000	0,01238
<b>Dlocation</b>	-2,24239	0,08489	-26,41	0,000	0,10620
<b>Dsaving</b>	-3,72052	0,11293	-32,94	0,000	0,02422
<b>Dlandown</b>	-1,39200	0,12944	-10,75	0,000	0,24857
<b>_cons</b>	5,04819	0,53756	9,39	0,000	-

Sumber: *Indonesia Family Life Survey* (2014)

Hasil regresi logit pada tabel 3 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan kepala rumah tangga memiliki arah negatif. Artinya, rumah tangga yang dikepalai oleh kepala rumah

tangga dengan pendidikan tinggi memiliki kemungkinan lebih kecil sebesar 0,012389 kali untuk mengalami kerentanan kemiskinan dibandingkan kepala rumah tangga yang berpendidikan menengah ke bawah. Hal tersebut juga dapat diartikan bahwa rumah tangga yang memiliki kepala rumah tangga berpendidikan rendah berpotensi lebih besar untuk mengalami kerentanan kemiskinan dibandingkan kepala rumah tangga yang berpendidikan tinggi.

Dalam konteks ini, seseorang dikatakan berpendidikan rendah apabila belum atau sudah menyelesaikan pendidikan sampai jenjang menengah pertama, sedangkan dikatakan berpendidikan tinggi apabila sudah menyelesaikan jenjang menengah ke atas sampai perguruan tinggi.

Hasil estimasi ini sesuai dengan studi menemukan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan yang diselesaikan oleh kepala rumah tangga, maka kerentanan kemiskinan rumah tangga tersebut akan menurun [28]. Melalui pendidikan yang tinggi, seorang kepala rumah tangga akan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dan peningkatan pada kesejahteraannya [13]. Selain itu, kemungkinan untuk mendapatkan peluang usaha juga semakin besar, sehingga kepala rumah tangga yang berpendidikan tinggi mampu menghadapi resiko kerentanan kemiskinan [18]. *Human capital* menyatakan bahwa pendidikan mampu meningkatkan kesejahteraan individu secara material dan non material. Hal ini dikarenakan pendidikan dinilai dapat meningkatkan produktivitas dan *skill* seseorang. Determinan kerentanan kemiskinan selanjutnya adalah variabel *dummy* lokasi tempat tinggal rumah tangga. Variabel lokasi terbagi menjadi dua dengan basis rumah tangga yang tinggal di perkotaan. Lokasi rumah tangga yang berada di perkotaan ternyata memiliki arah negatif dengan status kerentanan kemiskinan. Artinya, rumah tangga yang berlokasi di perkotaan memiliki kemungkinan lebih kecil untuk mengalami kerentanan kemiskinan dibandingkan rumah tangga yang tinggal di pedesaan. Besaran kemungkinan tersebut adalah sebesar 0,106203 kali. Hasil estimasi ini juga dapat diartikan bahwa kerentanan kemiskinan lebih banyak dialami oleh rumah tangga yang berada di wilayah pedesaan.

Hasil dari studi ini sesuai dengan penelitian mengenai kerentanan kemiskinan di Indonesia yang telah dilakukan oleh [29]. Mereka menemukan bahwa rumah tangga yang tergolong rentan miskin di Indonesia didominasi oleh rumah tangga yang berada di pedesaan. Selanjutnya, Fiji juga menunjukkan bahwa kerentanan kemiskinan merupakan fenomena yang banyak menimpa rumah tangga yang tinggal di desa [19]. Pendapat tersebut sesuai dengan temuan Azam & Imai, dimana berdasarkan hasil penghitung total kerentanan kemiskinan diketahui bahwa proporsi penduduk di pedesaan yang tergolong rentan miskin

lebih banyak dibandingkan penduduk di perkotaan[26]. Kondisi ini dapat terjadi karena fasilitas publik di perkotaan lebih lengkap dibandingkan wilayah pedesaan. Umumnya, infrastruktur dan transportasi umum di wilayah pedesaan belum berkembang. Hal ini menyebabkan rumah tangga yang tinggal di desa kesulitan untuk mengakses pusat layanan kesehatan, fasilitas pendidikan, dan pasar. Akibatnya, kegiatan ekonomi rumah tangga menjadi terhambat, sehingga rentan untuk jatuh miskin di tahun mendatang. Belum lagi sebagian besar penduduk di pedesaan yang masih menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian yang subsisten[20]. Padahal, pendapatan dari pertanian bersifat fluktuatif karena sangat bergantung pada kondisi cuaca, rentan terhadap banjir, dan harga pasar yang berfluktuasi. Akibatnya, pengeluaran per kapita rumah tangga di pedesaan umumnya lebih kecil dibandingkan rumah tangga di perkotaan. Berdasarkan data rumah tangga tahun 2014, rata-rata pengeluaran per kapita rumah tangga di pedesaan hanya sebesar Rp.675.366,81 , sedangkan di perkotaan mencapai Rp. 1.011.650,65.

Pembahasan selanjutnya terkait variabel dummy aset rumah tangga berupa kepemilikan tabungan seperti dalam bentuk kepemilikan tanah. Aset finansial merupakan salah satu determinan penting dalam mempengaruhi kerentanan kemiskinan. Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 4 variabel kepemilikan tabungan memiliki arah yang negatif terhadap kemungkinan rumah tangga berstatus rentan miskin. Basis dari variabel dummy kepemilikan tabungan ini adalah rumah tangga yang memiliki tabungan. Artinya, rumah tangga yang memiliki tabungan memiliki kemungkinan lebih kecil untuk jatuh miskin pada tahun mendatang dibandingkan rumah tangga yang tidak memiliki tabungan, yaitu sebesar 0,02422 kali.

Tabel 4. Distribusi rumah tangga rentan tinggi dan rendah berdasarkan kepemilikan tanah

Karakteristik Ekonomi	Status Kerentanan	Desa		Kota		Total		Proporsi Agregat	
		Freq*	%	Freq*	%	Freq*	%		
Kepemilikan tanah	memiliki tanah	rentan tinggi	217	20.11	128	11.86	345	3.64	14.29%
		rentan rendah	232	21.50	502	46.52	734	7.74	68.03%
		total	449	41.61	630	58.39	1079	11.38	
	tidak memiliki tanah	rentan tinggi	2618	31.13	1782	21.19	4400	46.39	52.32%
		rentan rendah	954	11.34	3056	36.34	4010	42.28	47.68%
		total	3572	42.47	4838	57.53	8410	88.67	

Temuan ini sesuai dengan konsep kerentanan kemiskinan yang disampaikan Philip & Rayhan (2004) bahwa aset merupakan sebuah *buffer* bagi rumah tangga agar mampu bertahan saat terjadi guncangan finansial. Tabungan adalah salah satu bentuk produk keuangan yang tergolong dalam aset likuid. Artinya, aset berupa tabungan dapat diubah menjadi uang kontan dalam waktu yang relatif cepat dengan nilai yang stabil. Tabungan



dinilai dapat mengontrol pengeluaran rumah tangga dan meringankan dampak negatif saat terjadi guncangan pendapatan, sehingga mengurangi resiko rumah tangga mengalami kerentanan kemiskinan. Jika dikaitkan dengan teori *sustainable livelihoods* dari Chambers[30], aset finansial khususnya tabungan termasuk dalam lima besar aset yang berkontribusi terhadap penghidupan berkelanjutan untuk mengurangi resiko jatuh miskin di tahun mendatang. Kelima jenis modal tersebut secara lengkap terdiri dari modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal alam, dan modal finansial[31].

Analisis berikutnya membahas tentang aset fisik yang dimiliki oleh rumah tangga. Dalam studi ini, penulis menggunakan variabel *dummy* kepemilikan tanah non usaha tani oleh rumah tangga sebagai *proxy*. Basis variabel ini adalah rumah tangga yang memiliki tanah. Hasil estimasi menunjukkan bahwa secara statistik variabel kepemilikan tanah berpengaruh signifikan dan memiliki arah negatif terhadap kemungkinan rumah tangga berstatus rentan miskin. Artinya, jika dibandingkan rumah tangga yang tidak memiliki tanah, rumah tangga yang memiliki tanah memiliki kemungkinan lebih kecil untuk jatuh miskin di tahun mendatang yakni sebesar 0,24857 kali. Terkait guncangan ekonomi yang identik dengan kerentanan kemiskinan, aset fisik dapat dijadikan penyelamat bagi rumah tangga agar mampu menghadapi guncangan ekonomi tersebut. Ini terjadi karena aset fisik menyediakan sumber pendapatan yang aman dalam menghadapi guncangan tersebut (Jha, dkk. 2009). Semakin besar aset fisik yang dimiliki rumah tangga, maka kemungkinan resiko rumah tangga untuk berstatus rentan miskin semakin kecil. Sebaliknya, jika rumah tangga memiliki sedikit aset fisik, maka rumah tangga tersebut memiliki kemungkinan yang besar mengalami kerentanan kemiskinan[32]. Dalam konteks ini, aset fisik berupa tanah memiliki karakteristik khusus. Tanah termasuk ke dalam aset tetap, yaitu aset jangka panjang atau aset yang relatif permanen. Pada hakikatnya, tanah memiliki nilai dan harga yang stabil. Sebab, aset fisik berupa tanah tidak mengalami penyusutan (*depreciation*), sehingga dapat dijadikan sumber proteksi rumah tangga agar tidak jatuh ke dalam kemiskinan di tahun mendatang. Selain itu, tanah yang dimiliki rumah tangga dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti modal investasi dan membuka usaha. Oleh karena itu, keberadaan tanah dapat mengurangi kerentanan kemiskinan dan membantu rumah tangga keluar dari kemiskinan sebagai aset bagi rumah tangga diharapkan dapat memudahkan mereka untuk menggunakannya saat tertimpa guncangan negatif.

## KESIMPULAN

simpulan dalam studi ini adalah: Berdasarkan penghitungan nilai kerentanan kemiskinan dengan metode *Vulnerability as Expected Poverty* (VEP), rata-rata nilai kerentanan kemiskinan rumah tangga di Indonesia pada tahun 2014 tergolong rentan tinggi, yaitu

sebesar 0,517. Secara spesifik, rumah tangga yang memiliki rata-rata nilai kerentanan kemiskinan tinggi berada di provinsi Lampung, DKI Jakarta, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Sementara itu, rumah tangga di provinsi Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, D.I Yogyakarta, dan Bali.

Berdasarkan analisis regresi logistik, ditemukan bahwa baik secara simultan maupun secara parsial variabel usia kepala rumah tangga, kuadrat usia kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, pendidikan kepala rumah tangga, kepemilikan tabungan, kepemilikan tanah, dan lokasi tempat tinggal signifikan mempengaruhi kerentanan kemiskinan rumah tangga.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] T. T. Vo, "Household vulnerability as expected poverty in Vietnam," *World Dev. Perspect.*, vol. 10, pp. 1-14.
- [2] T. A. Demissie, B. S., & Kasie, "Households' Vulnerability to Poverty in Ethiopia," *J. Poverty*, vol. 6, no. 21, pp. 528-542, 2017.
- [3] A. P. Thirwall, *Growth and Development with Special Reference to Developing Economies*, 8th editio. United Kingdom: Palgrave Macmillan, 2006.
- [4] Bapenas, "Kita Suarakan MDGs Demi Pencapaiannya di Indonesia," Jakarta, 2008.
- [5] S. Haughton, J., & Khandker, "Handbook on poverty and inequality," Washington, 2015.
- [6] W. Cendriono, N., Ardiana, T. E., & Widhianingrum, "Pelatihan akuntansi dan wirausaha pengelola bantuan dan penerima bantuan program jalin matra penanggulangan kerentanan kemiskinan provinsi jawa timur tahun 2016 di desa kaibon kecamatan geger kabupaten madiun," *J. Terap. Abdimas*, vol. 3, no. 1, pp. 14-18, 2018.
- [7] A. Dutta, I., Foster, J., & Mishra, "On measuring vulnerability to poverty," *Soc. Choice Welfare*, vol. 37, no. 4, p. 743, 2011.
- [8] Y. T. Kurniawan, "Strategi Optimalisasi Program Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (Studi Kasus Program Jalinmatra PK2 di Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)," *Cakrawala*, vol. 12, no. 1, pp. 97-105, 2012.
- [9] Bank Indonesia., "Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (Laporan Nusantara)," Jakarta, 2014.
- [10] S. Dercon, "Vulnerability. Jesus College and CSAE, Department of Economics," *Oxford Univ.*, 2011.
- [11] L. Ligon, E. & Scheschter, *Different Approaches to Estimating Vulnerability*. Washington, 2004.
- [12] Gomes Faustino Cardoso, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Andi Ofiset, 2003.
- [13] A. Chaudhuri, S., Jalan, J., & Suryahadi, "Assessing household vulnerability to poverty from cross-sectional data: A methodology and estimates from Indonesia,"

*Discuss. Pap. New York Columbia Univ.*, vol. 01, pp. 02-05, 2002.

- [14] Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), "Situasi Permasalahan Kesejahteraan dan Upaya Mengatasinya," Jakarta, 2015.
- [15] A. Bah, *Estimating Vulnerability to Povert Using Panel Data: Evidence from Indonesia.*, vol. 02. Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)., 2013.
- [16] D. F. Deressa, "Assessing households vulnerability to poverty in rural Oromiya-Ethiopia," *J. Econ. Sustain. Dev.*, vol. 4, no. 8, pp. 1-12, 2013.
- [17] Edi Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- [18] I. Kasirye, *Vulnerability and Poverty Dynamics in Uganda*, Research S. Uganda: Economic Policy Research Centre (EPRC), 2007.
- [19] Y. Jha, R., Dang, T., & Tashrifov, "Economic vulnerability and poverty in Tajikistan," *Econ. Chang. Restruct.*, vol. 43, no. 2, pp. 95-112, 2010.
- [20] S. C. Todaro, M. E & Smith, *Pembangunan Ekonomi. Edisi kesembilan*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- [21] M. Matul, *Financial Behaviours and Vulnerability to Poverty in Low-Income Households in Transition Context*. Geneva: International Labour Organisation (ILO), 2009.
- [22] P. Narayan, D. & Petesch, "Moving Out of Poverty: Cross -Disciplinary Perspectives on Mobility," *A Copublication Palgrave Macmillan World Bank*, vol. 1, 2007.
- [23] M. I. Philip, D. & Rayhan, "Vulnerability and Poverty: What are the Causes and How They Related," *Term Pap. Interdiscip. Course*, 2004.
- [24] Badan Pusat Statistik, "Produk Domestic Bruto," Provinsi Papua, 2019.
- [25] I. Hapsoro, A.W. & Buchori, "Kajian kerentanan sosial dan ekonomi terhadap bencana banjir (studi Kasus: wilayah pesisir kota Pekalongan)," *Tek. PWK (Perencanaan Wil. Kota)*, vol. 4, no. 4, pp. 542-553, 2015.
- [26] K. S. Azam, M. S. & Imai, "Vulnerability and Poverty in Bangladesh," *Chronic Poverty Res. Cent. Work. Pap.*, vol. 3, no. 2, pp. 141-153, 2009.
- [27] S. A. Adepoju, A.O. & Yusuf, "No TitlePoverty and vulnerability in rural south-west Nigeria," *ARPN J. Agric. Biol. Sci.*, vol. 7, no. 6, pp. 430-447, 2012.
- [28] A.A Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009.
- [29] S. Pritchett, L., Suryahadi, A., & Sumarto, "Quantifying vulnerability to poverty: A proposed measure, applied to Indonesia," *World Bank Publ.*, 2000.
- [30] G. Chambers, R. & Conway, "Sustainable rural livelihoods: practical concept for the 21st century," *Inst. Dev. Stud. (UK).*, 1992.
- [31] G. & M. J. Kamanou, "Measuring Vulnerability to Poverty," *World Inst. Dev. Econ. Res. Pap. 2002(58)*, 2002.
- [32] A. Mba, P. N., Nwosu, E. O., & Orji, "An Empirical Analysis of Vulnerability to Poverty in Nigeria: Do Household and Regional Characteristics Matter," *Int. J. Econ. Financ. Issues*, vol. 8, no. 4, pp. 271-276, 2018.